

**SIKAP PETANI TERHADAP PROGRAM KELEMBAGAAN
HUTAN RAKYAT
DI DESA BATUMALONRO KECAMATAN BIRING BULU
KABUPATEN GOWA**



BOSSANA

Oleh:
HAMID ALI SANGAJI
4592033014

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2002

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Sikap Petani Terhadap Program Kelembagaan
Hutan Rakyat di Desa Batumalonro Kecamatan
Biring Bulu Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : HAMID A. SANGAJI
Stambuk / Nirm : 4592033014
Jurusan : Sosial Ekonomoi Pertanian
Fakultas : Pertanian



Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

(**Ir. Hj. Suryawati Salam, M.Si**)
Pembimbing Utama

(**Ir. M. Jamil Gunawi, M.Si**)
Pembimbing Anggota

(**Ir. Aylee Christine, M.Si**)
Pembimbing Anggota



(**Ir. Zulkifli Maulana, M.P**)
Dekan Fak. Pertanian

Diketahui Oleh :

(**Ir. Ratnawati Tahir, MS.i**)
Ketua Jur. Sosek Pertanian

Tanggal Lulus : 5 Juli 2002

LEMBAR PENGESAHAN

**SIKAP PETANI TERHADAP PROGRAM KELEMBAGAAN HUTAN
RAKYAT
DI DESA BATUMALONRO KECAMATAN BIRING BULU
KABUPATEN GOWA**

OLEH
HAMID A. SANGAJI
4592033014



Telah Dipertahankan Didepan Penguji dan Dinyatakan
Lulus Pada Tanggal 23 Agustus 2002

Mengetahui dan Mengesahkan
Rektor Universitas "45" Makassar



DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas "45" Makassar



IR. ZULKIFLI MAULANA, MP

RINGKASAN

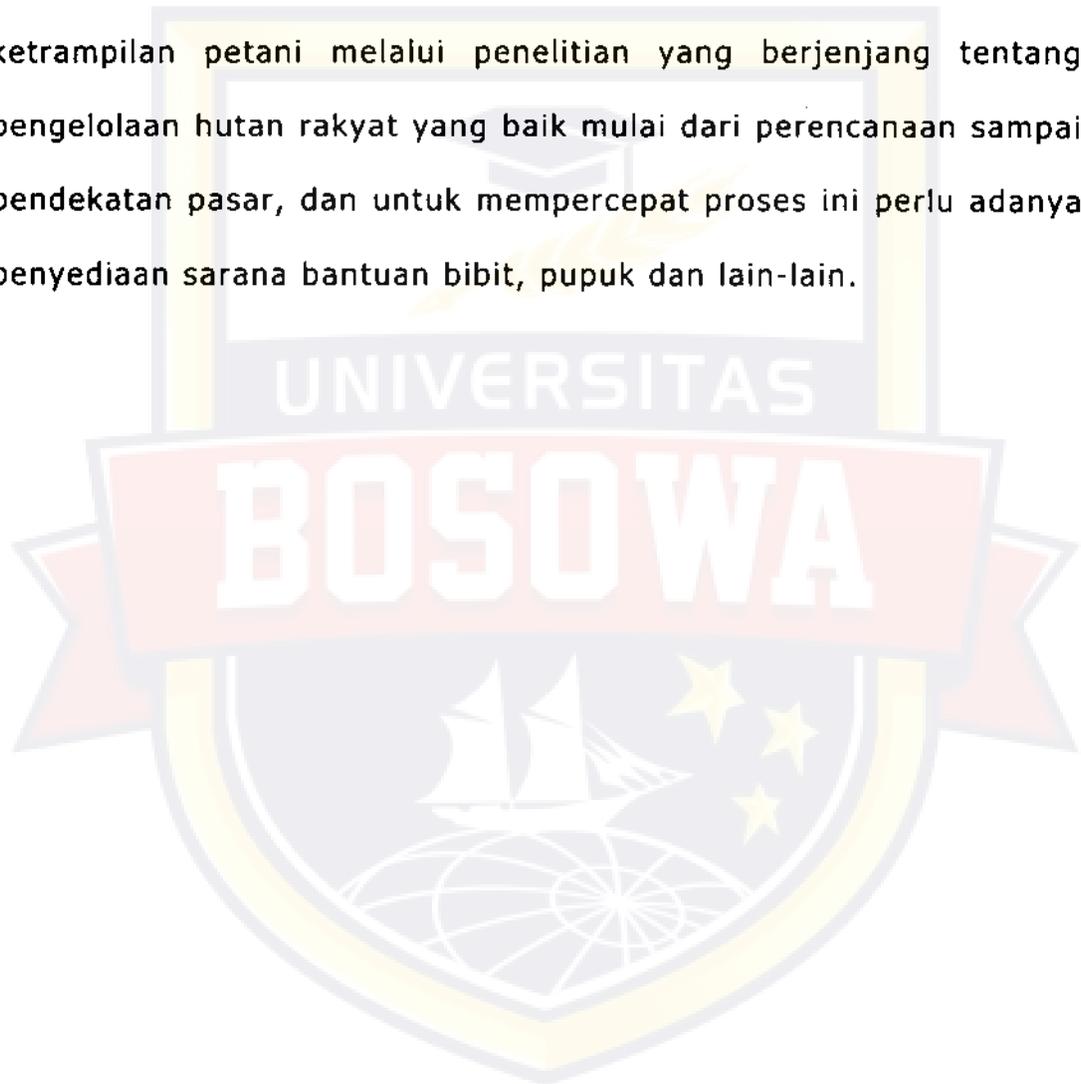
Hamid A. Sangaji (4592033014) Sikap Petani terhadap Program Kelembagaan Hutan Rakyat di bawah bimbingan Hj.Suryawati Salam, Aylee Christina dan M. Jamil Gunawi.

Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan yaitu bulan April sampai dengan bulan Mei 2002 yang bertujuan untuk melihat Sikap Petani terhadap Kelembagaan dalam Rangka Pembangunan Hutan Rakyat dan untuk mengetahui motivasi masyarakat tani menerima program kelembagaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus pada satu kelompok tani hutan rakyat dengan jumlah anggotanya 40 orang sebagai responden. Sedangkan tujuannya untuk melihat sikap petani terhadap kelembagaan dan motivasi masyarakat menerima program kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga dalam pengolahan hutan rakyat sangat diperlukan oleh petani di Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Sedangkan untuk meningkatkan program serta masyarakat dalam memanfaatkan proses program kelembagaan untuk mendukung pengembangan hutan rakyat perlu adanya campur tangan dari pihak lain, terutama dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani melalui penelitian yang berjenjang tentang pengelolaan hutan rakyat yang baik mulai dari perencanaan sampai pendekatan pasar, dan untuk mempercepat proses ini perlu adanya penyediaan sarana bantuan bibit, pupuk dan lain-lain.



KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk-Nya sehingga dapat menyusun skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan study pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas 45 Makassar.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan yang diberikan oleh ibu IR. Hj. SURYAWATI SALAM, M.Si, ibu IR. AYLEE CHRISTINE, M.Si dan Bapak IR. JAMIL GUNAWI, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih semoga Tuhan memberikan imbalan yang berlipat ganda.

Tak lupa kepada Bapak Pimpinan dan Staf Universitas 45 Makassar, Bapak Dekan Fakultas Pertanian serta dosen-dosen pengajar yang mempunyai andil yang sangat besar selama bertahun-tahun dengan keikhlasan memberikan ilmu pengetahuan, dengan ini diucapkan banyak terima kasih.

Melalui kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Jeneberang-Walanae.

2. Bapak Kepala Dinas Kehutana Kabupaten Gowa.
3. Bapak Kepala Desa Batumalonro serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
4. Segenap responden yang telah memberikan masukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
5. Seluruh kerabat dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dan semua keluarga yang memberikan dorongan dan Doa restu yang tak henti-hentinya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, kami sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu dengan lapang dada kritik dan saran dari semua pihak.

Semoga tulisan ini bermanfaat, AMIN”.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Hutan	5
2.2 Beberapa Jenis Hutan Berbasis Masyarakat	5
2.3 Lembaga	10
2.4 Upaya Pembinaan Terhadap Kelembagaan Hutan Rakyat yang Dilakukan tenaga pendamping	14
2.5 Rencana Umum Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan	15
2.6 Kelompok Tani	19
2.7 Motivasi	22

BAB III	METODE UMUM LOKASI PENELITIAN	24
	3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	24
	3.2 Penentuan Responden	24
	3.3 Pengumpulan Data	24
	3.4 Analisis Data	25
BAB IV	KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	27
	4.1 Letak dan Batas Administrasi	27
	4.2 Keadaan Iklim dan Topografi.....	27
	4.3 Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan.....	28
	4.4 Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.	29
	4.5 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi.....	29
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	31
	5.1 Identitas Petani Responden.....	31
	5.2 Pelaksanaan Program Kelembagaan.....	34
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	50
	6.1 Kesimpulan	50
	6.2 Saran-saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Luas dan Penggunaan Lahan di Desa Batumalonro.....	28
2.	Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi	30
3.	Umur Petani Responden	31
4.	Tingkat Pendidikan Petani Responden	32
5.	Luas Tanah Garapan Petani Responden.....	33
6.	Sikap Petani Terhadap Program Kelembagaan.....	36
7.	Sikap Petani Terhadap Sistim Pembinaan Kelompok Tani	42
8.	Sikap Petani Terhadap Peran Lembaga	45
9.	Motivasi Masyarakat Menerima Program Kelembagaan	48



I. PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati, saat ini telah banyak memberi manfaat dan menyumbang devisa negara yang cukup tinggi. Selama tiga dekade ini cukup banyak devisa yang dihasilkan dari hasil hutan kayu, tetapi dampak negatifnya juga tidak sedikit karena sistem pengelolaan hutan kurang transparan dan tidak mengindahkan prinsip pengelolaan hutan yang lestari dan tidak mampu menumbuhkan ekonomi rakyat terutama bagi masyarakat di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung dari pada hutan.

Pengelolaan hutan saat ini yang dicanangkan pemerintah khususnya Departemen Kehutanan adalah kebijaksanaan pembangunan kehutanan diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan asas kelestarian produksi, ekologi dan sosial ekonomi demi terwujudnya Forest For People (Hutan untuk Manusia) dengan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan.

Pengelolaan hutan yang selama ini telah dilaksanakan lebih menekankan pada Timber Management (produksi kayu), dimasa yang akan datang lebih ditujukan pada pengelolaan sumber daya alam hutan secara menyeluruh (*Forest Resources Management*) dengan berorientasi

kepada peningkatan peran serta masyarakat agar sumber daya hutan lestari.

Dengan berubahnya kebijaksanaan dari timber management menjadi *resources based management* maka pengembangan pembangunan hutan khususnya pembangunan hutan rakyat mempunyai peluang sangat besar bagi peningkatan perekonomian rakyat, karena potensinya cukup besar untuk dikembangkan dengan mengoptimalkan ruang tumbuh hutan dan lahan.

Dengan kebijaksanaan yang baru ini pemerintah dalam hal ini pihak Departemen Kehutanan melihat dan menangkap peluang yang telah bergulir dimana sentral pembangunan adalah ekonomi kerakyatan. Sehingga pihak kehutanan tiga tahun belakangan ini bermitra dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Peran kelembagaan yang terkait sangat menentukan terwujudnya perekonomian kerakyatan. Dimana peran serta kelembagaan dalam memberdayakan masyarakat dengan menciptakan atau membangun kelembagaan petani yang dikenal dengan nama Kelompok Tani atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kelompok inilah yang melakukan setiap kegiatan pembangunan hutan rakyat yang terorganisir dan mandiri.

Potensi hutan rakyat di Kabupaten Gowa seluas \pm 5270 Ha dengan dikembangkan unit percontohan secara kelembagaan seluas

± 100 ha (4 unit). Untuk kecamatan Biring Bulu seluas 480 Ha dengan 2 unit percontohan seluas 50 Ha, sedangkan potensi Hutan Rakyat di Desa Batumalonro seluas 65 Ha dengan unit percontohan seluas 25 Ha (1 unit).

Melihat potensi pengembangan hutan rakyat khususnya di Kabupaten Gowa, maka perlu diadakan penelitian tentang pengelolaan hutan rakyat yang terorganisir dengan baik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana sikap petani terhadap kelembagaan dalam rangka pengelolaan hutan rakyat.
- b. Sejauh mana motivasi masyarakat tani atau anggota kelompok tani menerima program-program kelembagaan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

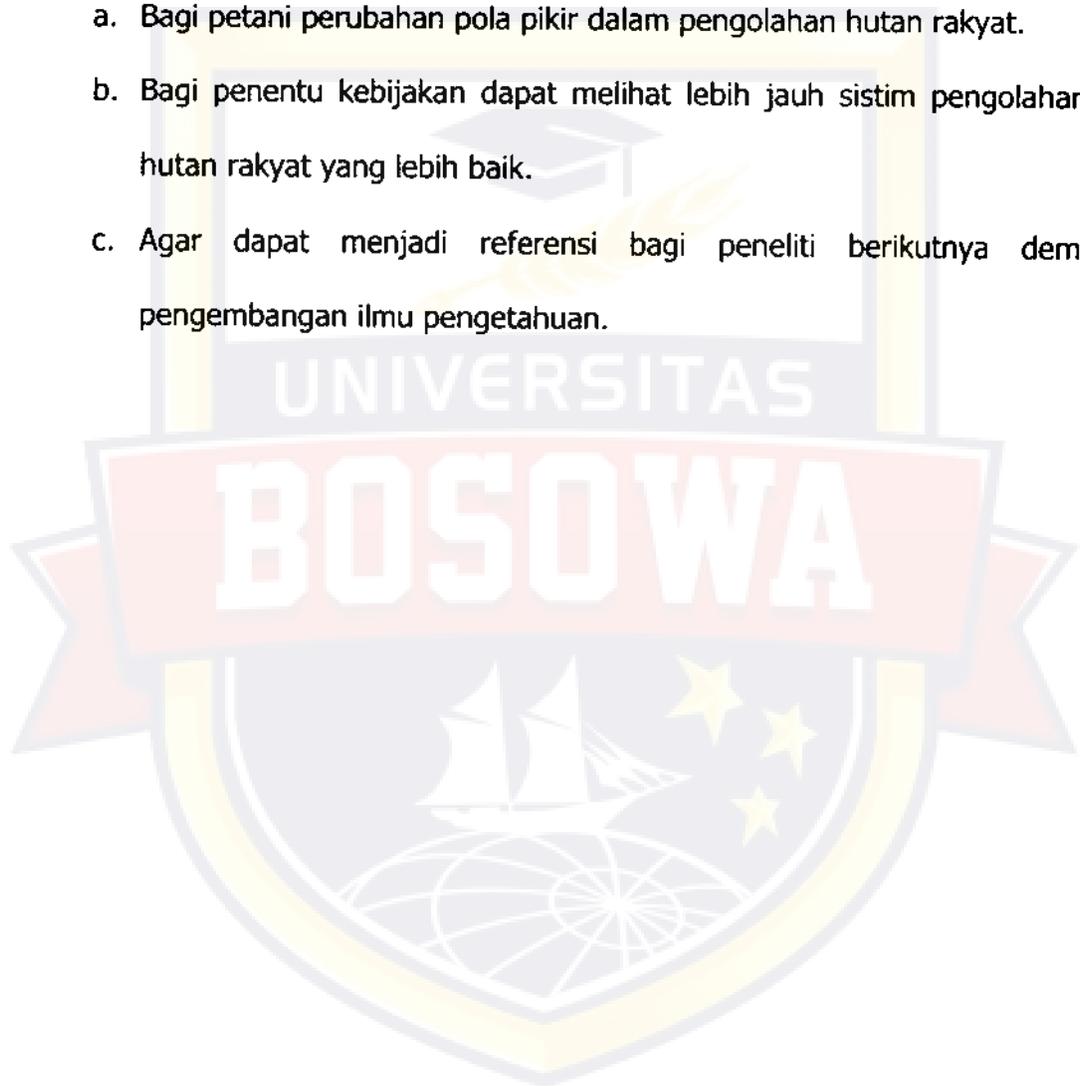
Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk melihat sikap petani terhadap kelembagaan dalam rangka pembangunan hutan rakyat pada pengelolaan hutan rakyat di Desa Batumalonro Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa.

- b. Untuk mengetahui motivasi masyarakat tani menerima program kelembagaan.

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Bagi petani perubahan pola pikir dalam pengolahan hutan rakyat.
- b. Bagi penentu kebijakan dapat melihat lebih jauh sistim pengolahan hutan rakyat yang lebih baik.
- c. Agar dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan

Hutan adalah bagian dari kehidupan manusia baik sebagai sumber air, obat-obatan, rotan, damar dan binatang buruan dan yang terpenting adalah kayu. Namun salah satu fungsi pokok adalah sebagai sumber air untuk menghidupi seluruh persawahan sebagai sumber hidup utama dari manusia (Sambolinggi L, 2000).

Pergeseran dalam paradigma pembangunan kehutanan dari kehutanan industrial (konvensional) menuju kehutanan masyarakat, menempatkan harapan yang besar kepada konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pada saat yang sama kalangan birokrat, praktisi, akademis dan pemerhati kehutanan mempunyai persepsi yang belum seragam tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat, (Alam S. 2000).

2.2 Beberapa Jenis Hutan Berbasis Masyarakat

2.2.1 Hutan Rakyat

Hutan rakyat dalam pengertian menurut perundang-undangan (No.5/1967 dan No.41/1999) adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Definisi untuk membedakan hutan negara, yaitu



hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Pengertian hutan rakyat seperti ini kurang mengutamakan rakyat sebagai pelaku pengelola. Penekanan kata rakyat seyogyanya lebih ditujukan kepada pengelolaan bukan pada status pemilikan tanahnya. Dengan menekankan pada rakyat sebagai pengelola membuka peluang bagi rakyat di sekitar hutan untuk mengelola hutan di tanah negara. Dengan demikian, pengertian hutan rakyat seyogyanya dilihat berdasarkan pelakunya atau subyek yang mengelola hutan, bukan berdasarkan status pemilikan tanahnya atau sifat obyek, (Alam S, 2000).

Hutan rakyat merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat secara tradisional sebagai salah satu bentuk usaha tani. Melalui hutan rakyat dapat diperoleh berbagai manfaat berupa penyediaan kayu bakar, pertukangan, bahan baku industri dan sebagainya. Selain itu dapat melindungi lahan dari proses pengrusakan tanah serta dapat meningkatkan produktivitas lahan. Usaha pengelolaan hutan rakyat diberbagai daerah telah lama dilaksanakan secara tradisional dari generasi kegenerasi baik yang berasal dari hutan rakyat yang tumbuh secara alami, ditanam secara swadaya maupun yang ditanam melalui proyek inpres penghijauan (Dep. Kehutanan, 1991).

Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat, baik secara perorangan, kelompok maupun badan hukum. Hutan rakyat pada

umumnya merupakan hutan buatan dan terletak di luar kawasan hutan negara (UU. No.5 tahun 1967). Berdasarkan pengertian di atas maka hutan rakyat mempunyai beberapa ciri, yaitu :

- a. Tidak merupakan suatu kawasan yang kompak, tetapi terpecah-pecah diantara lahan-lahan pedesaan.
- b. Bentuk usahanya tidak selalu murni berupa kayu-kayuan tetapi terpadu atau dikombinasikan dengan berbagai tanaman seperti tanaman perkebunan, rumput, makanan ternak dan tanaman pangan, usaha seperti ini disebut agroforestry. (Dep. Kehutanan, 1991).

Pembangunan hutan rakyat dimaksudkan agar tercipta optimalisasi pemanfaatan lahan khususnya lahan-lahan terlantar dan tidak produktif serta memberikan kesempatan yang lebih besar kepada petani untuk melakukan diversifikasi usaha taninya. Adapun tujuan pembangunan hutan rakyat, yaitu :

- a. Meningkatkan produktifitas lahan kritis/tidak produktif secara optimal dan lestari.
- b. Membantu penganekaragaman hasil pertanian yang diperlukan masyarakat tani.
- c. Membantu masyarakat dalam pengadaan kayu bangunan dan bahan bakar serta industri.

- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.
- e. Memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan rakyat yang berada di kawasan perlindungan di daerah hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS), (Dep. Kehutanan, 1991).

2.2.2 Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan dan Kehutanan Masyarakat adalah dua istilah yang mempunyai pengertian yang berbeda baik konsep maupun implementasinya. Hutan Kemasyarakatan (Forest Community) adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan kesejahteraan masyarakat disekitarnya (Kepmen. 677 Tahun 1999). Sedangkan kehutanan masyarakat (Community Forestry) adalah konsep kehutanan yang berintikan partisipasi rakyat, artinya rakyat yang diberi wewenang merencanakan dan memutuskan sendiri apa yang mereka kehendaki. Kehutanan masyarakat didedikasikan sebagai gagasan untuk meningkatkan keuntungan langsung sumber daya hutan kepada masyarakat sekitarnya (FAO, 1983). Dengan kata lain, Hutan Kemasyarakatan adalah terminology yang digunakan dalam program

yang inisiatifnya datang dari pemerintah, sedangkan Kehutanan Kemasyarakatan merujuk kepada berbagai kegiatan pengelolaan hutan yang inisiatornya adalah masyarakat sendiri, (Alam S, 2000).

Prinsip pengelolaan hutan kemasyarakatan harus dipertimbangkan sesuai fungsinya sebagai hutan lindung, maka prinsip ekosistem merupakan dasar pertimbangan yang utama. Ketinggian dan topografi dari hutan menentukan perlakuan yang khusus oleh masyarakat sebagai suatu tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan. Prinsip keseimbangan antara manfaat dengan ekosistem dan proses pelestarian hutan merupakan acuan dasar, (Sambolinggi L, 2000).

2.2.3 Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial pertama kali digunakan dalam penyelenggaraan program oleh Perum Perhutani di Jawa pada tahun 1986. Perhutanan sosial sebagai program pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga kelestariannya, (Suharjita, Didik, 2000).

Menurut Harnanto H.M. (1997), Perum Perhutani di dalam mengelola hutan di Pulau Jawa sudah sejak awal selalu memperhatikan masyarakat Desa sekitarnya, dengan cara mengikutsertakan mereka

dalam kegiatan perhutanan. Kepedulian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa hutan yang pada umumnya masih rendah, sekaligus juga meningkatkan keberhasilan pembangunan hutan.

Rendahnya kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa sekitar hutan yang selama ini menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya hutan Perum Perhutani. Permasalahan spesifik yang dihadapi masyarakat desa hutan pada umumnya antara lain : kurangnya lapangan kerja, pemilikan lahan garapan sempit, kurangnya keterampilan, ketergantungan pada sumberdaya hutan cukup tinggi, (Harnanto, 1997).

2.3. Lembaga

Organisasi pada hakekatnya terwujud bersamaan dengan adanya persekutuan atas masyarakat sejak manusia menjadi penghuni di bumi ini, meskipun bentuk dan susunan masih sangat sederhana. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat pada waktu itu, (Moenir, 1987).

Siagian (1983), mengemukakan bahwa para ahli lumrah melakukan pembahasan tentang organisasi dari dua segi pandangan, yaitu organisasi yang ditelaah dengan pendekatan struktural dan organisasi yang disoroti dengan pendekatan keperilakuan. Pendekatan



BOSOWA

yang sifatnya struktural menyoroti organisasi sebagai wadah dan pandangan kedua menyoroti organisasi sebagai suatu organisme yang dinamik.

Ndraha (1984), mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk kegiatan atau usaha bersama daripada sekelompok atau seluruh anggota masyarakat untuk mencapai maksud atau memenuhi kebutuhan tertentu. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk di dalam masyarakat bersifat non pemerintah kendatipun dibentuk berdasarkan ketentuan formal dari pemerintah.

Dalam ilmu sosiologi memberikan definisi sebagai berikut :

- Lembaga berasal dari kata Institution yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan. Dalam pengertian sosiologi bahwa lembaga dapat dilakukan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus sampai menjadi adat istiadat kemudian berkembang menjadi tata aturan.
- Kelembagaan adalah kumpulan dan berbagai tata cara kehidupan kelompok terorganisir yang diakui untuk mengatur hubungan-hubungan manusia sebagai satu jaringan antara kelompok sesuai dengan kepentingan-kepentingan serta pola-polanya yang apabila dilanggar akan dijatuhi sanksi (Soerjono Soekanto, 1982).

Terbentuknya lembaga atau organisasi dalam suatu masyarakat, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik berasal dari dalam organisasi maupun bersumber dari luar organisasi.

Siagian (1983), mengemukakan bahwa komponen-komponen lingkungan yang mempunyai dampak tertentu terhadap organisasi terdiri dari lima hal, yaitu : (1) Faktor ekonomi, (2) Faktor sosial, (3) Faktor fisik, (4) Faktor politik dan (5) Faktor teknologis.

Setiap manager memahami berbagai faktor pembentuk perilaku setiap bawahannya, yaitu : (1) Faktor genetik, (2) Faktor lingkungan, (3) Faktor pendidikan dan (4) Faktor pengalaman.

Kelangsungan hidup suatu lembaga pembangunan di pedesaan sebagai lembaga swadaya masyarakat, yaitu :

1. Selalu bekerja mandiri dan berswadaya
2. Memiliki peluang untuk sejalan atau berbeda pendapat dengan pemerintah.
3. Memperoleh kesempatan untuk diberi pengakuan atas prestasi kerjanya.
4. Memiliki ruang hidup untuk tumbuh dan berkembang.

5. Mempunyai kesempatan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah, (Salim, 1985).

Salah satu kelembagaan yang ada di pedesaan adalah kelembagaan hutan rakyat. Keberadaan kelembagaan ini belum berfungsi secara baik, mengingat hutan rakyat yang dibangun oleh masyarakat kondisinya belum menggambarkan bentuk pengelolaan hutan yang benar sehingga masyarakat di dalam pengelolaan hutan rakyat condong dilakukan secara tradisional. Perencanaan, pelaksanaan pembuatan hutan rakyat belum dapat dijalankan secara baik dan benar, lebih-lebih kegiatan pembinaan, evaluasi dan monitoring.

Lemahnya lembaga hutan rakyat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat, yaitu : (1) Lemah penguasaan teknologi, (2) Lemah modal dan (3) Lemah dalam mempertahankan asset pasar. Sehingga peranan pemerintah yang dalam hal ini dinas/instansi terkait perlu ditingkatkan peranannya. Penyediaan fasilitas dorongan dan berbagai kemudahan diharapkan mampu meningkatkan peranan lembaga-lembaga yang mendukung pembangunan hutan rakyat. Dengan demikian peranan kelembagaan hutan rakyat ini diharapkan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tani disekitar lokasi, (Dep. Kehutanan, 1996).

Sebagai program yang merupakan asas Mitra Seajar, ternyata implementasinya tidaklah mudah, karena antara masyarakat dengan Perum Perhutani merupakan dua ekosistem yang berbeda. Untuk mengatasi kesenjangan hubungan ini, LSM berperan sebagai perekat dan jembatan. Pilihan kepada LSM ini muncul karena LSM dipandang cukup fleksibel dalam berkomunikasi, dalam arti LSM mampu berkomunikasi dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat bawah kepada Perum Perhutani dan LSM dapat menjabarkan program Perum Perhutani kepada masyarakat, (Iswawan B, MS. 1997).

2.4 Upaya Pembinaan Terhadap Kelembagaan Hutan Rakyat yang Dilakukan Tenaga Pendamping.

- a. Pembinaan yang mengarah pada pengembangan peranan dan fungsi lembaga serta kepercayaan akan kemampuannya dalam menumbuhkan partisipasi kelompok masyarakat pada wilayah pengelolaan hutan rakyat.
- b. Pembinaan harus disesuaikan dengan kondisi, keinginan maupun kebutuhan masyarakat agar peranan kelembagaan dapat dirasakan manfaatnya.

- c. Pembinaan pada hakekatnya adalah membantu, membimbing dan memberikan arahan agar cepat mampu dan berkembang secara mandiri.

Menurut Departemen Kehutanan (1996), teknik pembinaan kelembagaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mendorong dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, antara anggota masyarakat dan lembaga, antara lembaga non formal dan lembaga formal.
- b. Menciptakan pola hubungan antara lembaga dalam masyarakat dan instansi/lembaga pemerintah secara timbal balik.
- c. Melakukan kontak langsung kepada dunia usaha dalam menampung informasi dan ketataniagaan hasil kayu hutan rakyat.
- d. Orientasi masalah, diusahakan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang dihadapi lembaga.

2.5. Rencana Umum Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan

Untuk pengembangan Hutan Rakyat di Sulawesi Selatan sesuai dengan Rencana Umum (LPPM-UNHAS, 1996) maka perlu memperhatikan :

- 1) Kebijakan pembangunan daerah



- 2) Kondisi sosial budaya masyarakat
- 3) Aspek sosial ekonomi.
- 4) Sarana penunjang

2.5.1 Kebijakan Pembangunan Daerah

Pendekatan pembangunan Hutan Rakyat harus disesuaikan dengan kebijakan Pembangunan Daerah terutama dengan Rencana Struktur Tata Ruang Daerah (RSTRD) baik tingkat I maupun tingkat II, kebijakan pengwilayahan komoditas, kebijakan penanggulangan lahan kritis dan pengendalian peladang berpindah dan kebijakan penanganan tanah terlantar.

Berdasarkan pada kebijakan-kebijakan tersebut di atas maka pendekatan pembangunan hutan rakyat diberbagai Daerah Tingkat II akan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya.

Daerah dengan arahan lebih sebagai Kawasan non budidaya atau kawasan lindung maka pembangunan hutan rakyatpun harus disesuaikan dengan arahan tata ruang tersebut. Penyesuaian ini dilakukan bukan hanya pada aspek pola tanam tetapi juga pada penentuan jenis tanaman, teknik pengolahan tanah, teknik budidaya dan juga pada sistim eksploitasinya.

Seluruh kegiatan dalam proses pembangunan dan penguatan hasil perlu disesuaikan dengan fungsi lindung khususnya perlindungan terhadap tata air dan erosi.

2.5.2 Kondisi Sosial Budaya

Pendekatan pembangunan hutan rakyat di Propinsi Sulawesi Selatan, juga harus mempertimbangkan faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya perlu mendapat perhatian adalah hal status pemilikan dan interaksi budaya masyarakat dengan hutan rakyat tersebut. Dalam hal ini status pemilikan hutan rakyat dapat dilihat bahwa sebagian bentuk pemilikan tersebut terkait dengan kelembagaan adat dan budaya, karena kondisi seperti ini maka pembangunan hutan rakyat hendaknya mempertimbangkan jenis-jenis komoditas tertentu sesuai dengan budaya setempat. Demikian pula dalam menentukan tanaman sela atau tanaman antara perlu memperhatikan aspek sosial budaya.

Melalui pendekatan sosial budaya ini diharapkan bahwa masyarakat akan terdorong untuk mengembangkan dan memelihara tanaman-tanaman hutan rakyat tersebut, karena manfaatnya sudah dikenal secara turun temurun. Selain itu jumlah pemilihan komoditas-komoditas tersebut juga menjadi status sosial dalam satu masyarakat.

2.5.3 Aspek Sosial Ekonomi

Pendekatan lain yang perlu dilakukan dalam pembangunan hutan rakyat adalah pendekatan sosial ekonomi. Aspek ini meliputi kebutuhan pasar, kebutuhan industri, nilai komoditas, penyerapan tenaga kerja dan faktor peluang usaha.

Berdasarkan pada pendekatan ini, maka dalam pembangunan hutan rakyat hendaknya digunakan jenis-jenis yang mempunyai potensi pasar, baik untuk pasar lokal maupun pasar regional. Pada daerah-daerah dengan kondisi ekonomi tertentu seperti Kabupaten Bulukumba sebagai pusat industri kapal kayu maka pengembangan hutan rakyatnya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan, misalnya perlu diusahakan jenis kayu bitti dan bayam, merupakan jenis-jenis tanaman yang sesuai untuk itu. Selain itu daerah-daerah dimana industri kerajinan, pabrik batu merah; kebutuhan industri mobiler maupun pertukangan lainnya.

Khusus untuk Kabupaten Gowa perlu dikembangkan jenis-jenis tanaman untuk bahan baku industri dalam memenuhi kebutuhan, permintaan industri-industri kecil di sekitar Kabupaten Gowa dan Makassar.

Melalui pendekatan seperti tersebut di atas maka diharapkan bahwa pembangunan hutan rakyat akan lebih berpeluang untuk dikembangkan sebagai salah satu usaha tani rakyat.

2.5.4 Sarana Penunjang

Pembangunan hutan rakyat akan dapat dilakukan dengan baik apabila sarana penunjang untuk itu tersedia. Sarana penunjang yang dibutuhkan dalam pembangunan hutan rakyat antara lain :

- a. Status hukum areal
- b. Sarana teknis
- c. Manajemen dan biaya
- d. Tenaga penyuluh
- e. Kebijakan pemerintah

Ketersediaan sarana penunjang tersebut di atas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan yang saling terkait satu sama lain sehingga penjabaran rencana-rencana yang dibuat oleh lembaga/ organisasi kelompok tani hutan rakyat dapat terlaksana dengan baik.

2.6 Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terkait secara non formal atas dasar keserasian kesamaan kondisi lingkungan. Sosial, ekonomi, sumberdaya, keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama (Departemen Kehutanan Tahun 1998).

Atas dasar kesamaan kepentingan di atas, kumpulan petani secara non formal tersebut berada pada satu wilayah komponen usaha tani (dalam satu wilayah kelompok).

Kelompok tani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Saling mengenal dengan baik antara sesama anggotanya, akrab dan saling percaya mempercayai.
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani.
- c. Memiliki kesamaan-kesamaan seperti dalam tradisi/kebiasaan, pemukiman, hamparan usaha lain dan bahasa.
- d. Bersifat non formal dalam arti tidak berbadan hukum tetapi mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab atas dasar kesepakatan bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Berbagai masalah yang dihadapi pengelolaan hutan rakyat pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga sub sistim yaitu :

- Sub sistim produksi
- Sub sistim pengolahan hasil
- Sub sistim pemasaran

Secara garis besar permasalahan dalam setiap sub sistim dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sub sistim produksi, belum adanya peraturan antara pemilik hutan rakyat menyebabkan keputusan masih tergantung kepada masing-masing pemilik sehingga kontinuitas produksi sulit dicapai.

Sementara dalam sub sistim pemanfaatan hasil produksi usahanya masih belum ada usaha untuk pengolahan lebih lanjut, kurangnya pengetahuan petani dalam pengolahan kayu menyebabkan mata kayu olahan yang dihasilkan seringkali masih rendah dan banyak menghasilkan limbah. Jenis-jenis produk yang dihasilkan seringkali belum memperhatikan syarat-syarat yang diminta pasar.

Dalam sub sistim pasar, ternyata sebagian besar petani hutan rakyat masih sangat rendah pengetahuan dalam hal pemasaran hasil-hasil kayunya. Dilain pihak informasi pasar masih sangat kurang dan disertai kurangnya permodalan yang dimiliki, menyebabkan peranan tengkulak dalam penentuan harga pasaran.

Dari uraian tersebut di atas bahwa peranan kelompok perlu dioptimalkan maupun suatu badan khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan rakyat sehingga perlu keberadaan lembaga di wilayah lokasi hutan rakyat.

2.7 Motivasi

Motivasi adalah suatu proses psikologi yang asasi dan paling penting dalam pendekatan mikro terhadap perilaku individu dan organisasi (Moekijat, 1988).

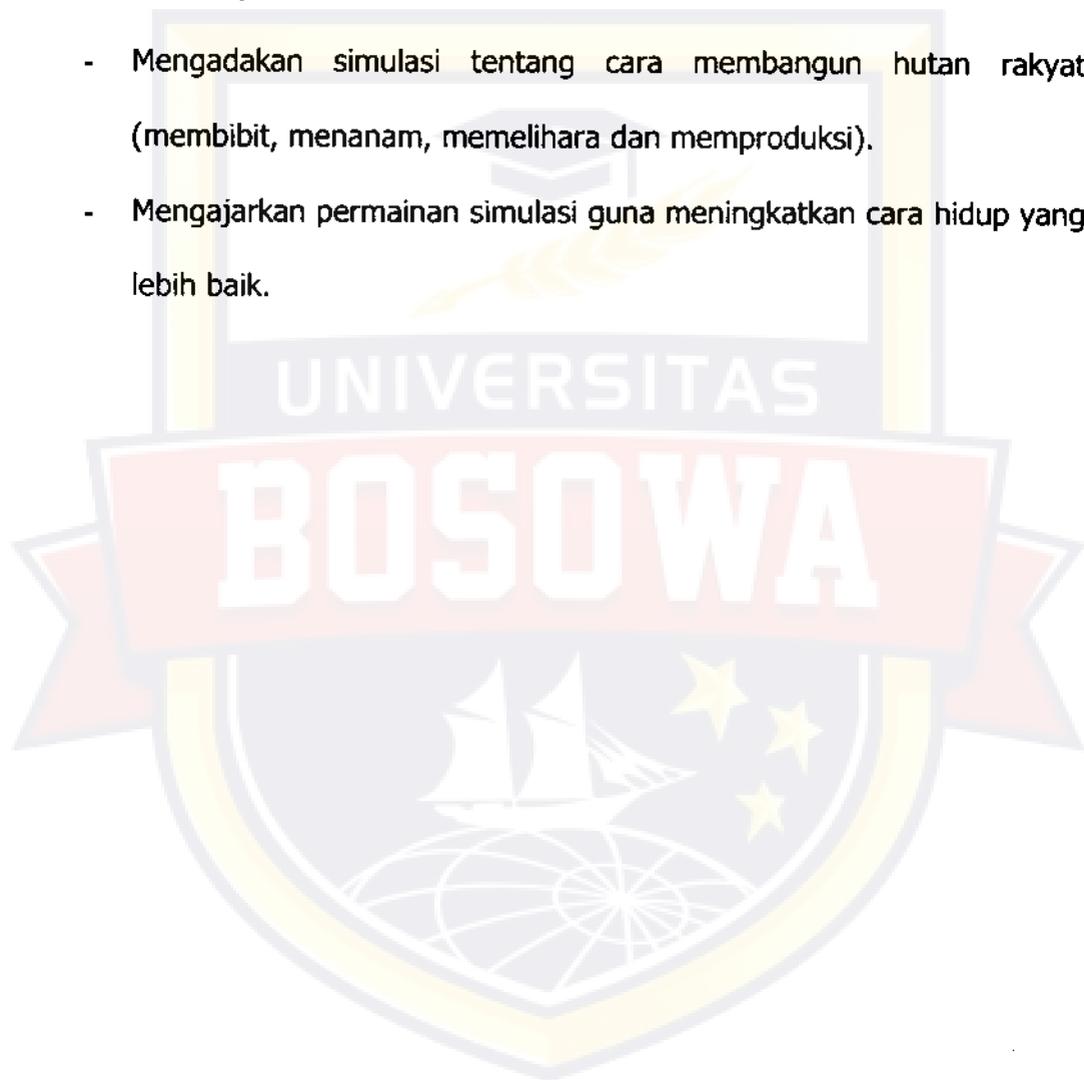
Banyak orang menyamakan sebab-sebab perilaku dengan sebab-sebab motivasi. Sebab-sebab perilaku adalah jauh lebih luas dan lebih kompleks dari sebab-sebab yang dapat dijelaskan oleh motivasi semata-mata. Akan tetapi motivasi ditunjukkan sebagai suatu proses yang sangat penting untuk memahami perilaku mengenai bermacam-macam jenis motif manusia.

Motivasi pada hakekatnya menggerakkan, mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah tujuan dan kunci untuk memahami motivasi terletak pada arti dan hubungan antara kebutuhan, perangsang dan tujuan.

Menurut Djatiwijaya, HR. (1982), beberapa alternatif bentuk motivasi yang dapat dikembangkan ditengah masyarakat tani :

- Mengadakan bimbingan secara massal, yang memiliki pengetahuan dan tingkat berfikir yang relatif sama.
- Mengadakan kunjungan rumah untuk mengenal masyarakat lebih dekat.

- Mengadakan diskusi/musyawarah dengan masyarakat terutama para tokoh masyarakat guna menemukan, mencari alternatif dan memecahkan masalah, serta tindak lanjut dari pemecahan masalah tersebut.
- Mengadakan simulasi tentang cara membangun hutan rakyat (membibit, menanam, memelihara dan memproduksi).
- Mengajarkan permainan simulasi guna meningkatkan cara hidup yang lebih baik.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batumalonro Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa dengan pertimbangan bahwa masyarakat tani di daerah ini mengelola hutan rakyat secara berkelompok serta ditunjang oleh sarana pendidikan agama (Pesantren) sekaligus wadah sosial dalam rangka memberikan motivasi masyarakat khususnya anggota kelompok tani dalam menerima dan melaksanakan program kelembagaan pada pembangunan hutan rakyat. Penelitian ini berlangsung dari bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2002.

3.2 Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan secara sensus pada 1 (satu) kelompok tani hutan rakyat di Desa Batumalonro yaitu kelompok tani Bungun Tujua dengan jumlah anggotanya 40 orang.

3.3 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden, yakni menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor Desa, kantor Statistik, Dinas Kehutanan Gowa, Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Jeneberang-Walanae.

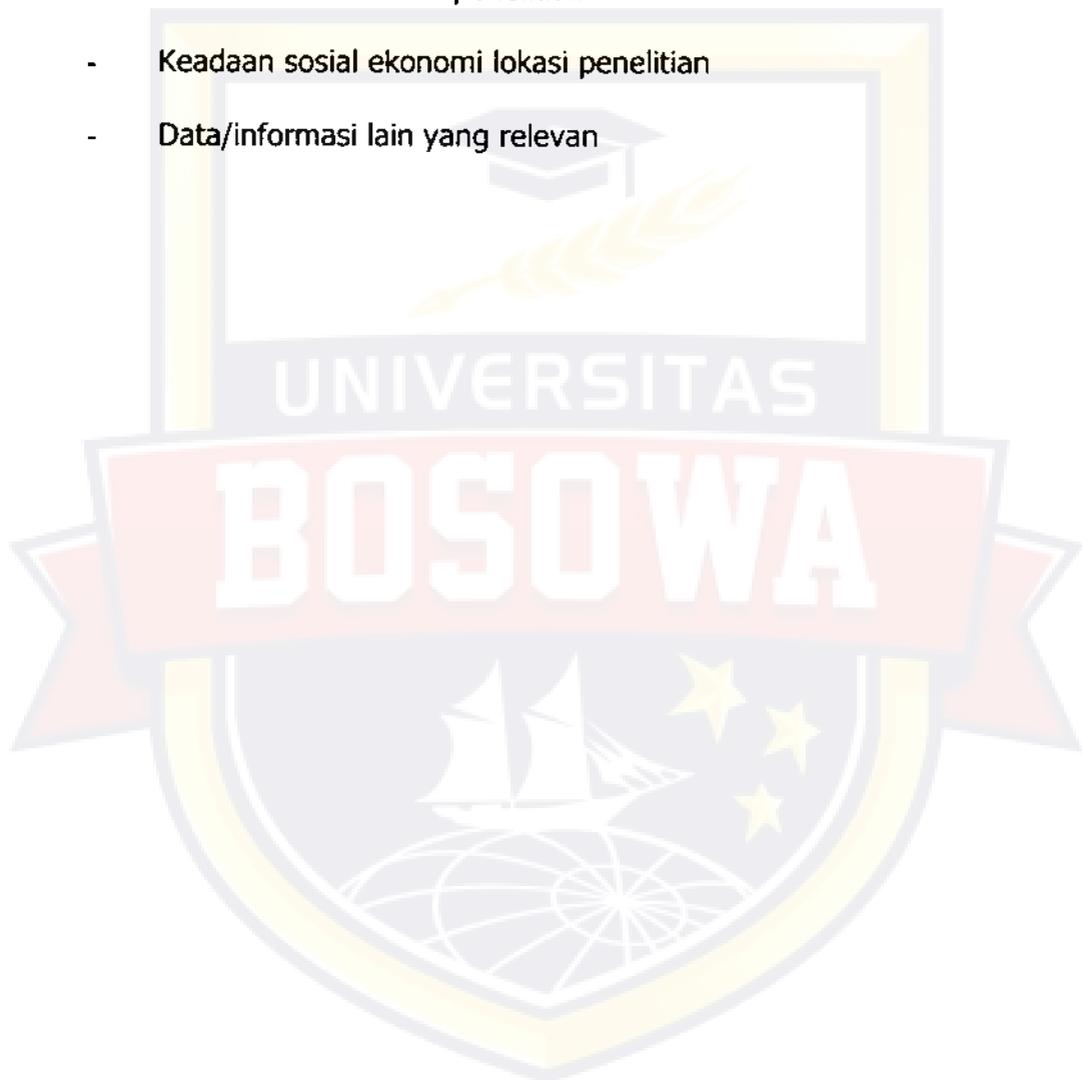
3.4 Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu mendiskripsikan hasil penelitian yang terdiri dari data primer meliputi keadaan pengurus dan anggota kelompok tani Bungung Tujua dan lembaga yang memberi pembinaan dengan variabel yang didiskripsikan yaitu :

- a. Identitas Petani Responden
 - Umur petani
 - Pendidikan
 - Luas garapan
 - Jumlah tanggungan
- b. Pelaksanaan Program Kelembagaan meliputi :
 - Sikap petani responden terhadap program kelembagaan
 - Pembinaan kelompok tani
 - Peranan lembaga
 - Motivasi petani

Sedangkan data sekunder meliputi gambaran umum lokasi penelitian yang diperoleh dari instansi yang erat kaitannya dengan penelitian yaitu data mengenai :

- Kondisi biofisik lokasi penelitian
- Keadaan sosial ekonomi lokasi penelitian
- Data/informasi lain yang relevan



IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN



4.1 Letak dan Batas Administrasi

Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu terletak \pm 58 km dari Sungguminasa ibukota Kabupaten Gowa dengan ketinggian 300-375 m dari permukaan laut.

Luas Batumalonro 3184 Ha (31,84 km²) terdiri dari 4 Dusun yaitu :

- Dusun Karaeng Tojeng 794 Ha
- Dusun Parangloe 820 Ha
- Dusun Malonjo 815 Ha
- Dusun Bunga Sunggu 755 Ha

Adapun batas-batas Desa Batumalonro adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Takalar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baturappe
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bungaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

4.2 Keadaan Iklim dan Topografi

Keadaan iklim sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha tani hutan rakyat. Di daerah ini tipe iklim berdasarkan Smidth Ferguson yaitu tipe B dengan curah hujan rata-rata bulanan 142 mm, maka daerah

ini cocok untuk dikembangkan usaha tani hutan rakyat sesuai dengan jadwal rencana yang disusun. Sedangkan keadaan topografi, datar (0 – 5%) sampai berbukit-bukit (15 – 40%) dan sebagian kemiringan > 45 %.

4.3 Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan

Jenis tanah di daerah ini adalah latosol dengan struktur tanah liat berpasir serta berbatu-batu, dengan keadaan lokasi seperti ini mudah terjadi erosi permukaan. Sedangkan penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas dan Penggunaan Lahan di Desa Batumalonro

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Sawah	221	6,94
2.	Perkebunan	725	22,77
3.	Tegalan	1000,94	31,44
4.	Pekarangan	32,06	1,01
5.	Padang rumput/ Semak belukar	12,16	0,38
6.	Kawasan hutan	1191,94	37,44
	Jumlah	3184	100

Sumber : Kantor Dinas Kehutanan Tahun 2000

Dari Tabel diatas terlihat bahwa luas terbesar adalah kawasan hutan 1191,94 Ha (37,44 %). Sedangkan untuk tegalan yang dimanfaatkan untuk usaha tani lahan kering seluas 1000,94 Ha (31,44 %) dengan ditanami tanaman semusim (jagung, kacang-kacangan). Sehingga untuk menghindari terjadinya pengikisan atau erosi pada musim hujan maka perlu dikembangkan usaha tani hutan rakyat sebagai vegetasi tetap untuk mengatur tata air, dan dapat mempertahankan kesuburan tanah.

4.4 Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Keadaan penduduk di Desa Batumalonro dengan jumlah penduduk 2528 orang (602 KK) dengan rincian laki-laki 1246 orang dan perempuan 1282. Sedangkan mata pencaharian sebagian besar petani yang berusaha tani pada lahan kering dengan pola usaha tani yang dominan adalah tanaman jagung, hal ini sangat berpengaruh terhadap meningkatnya lahan kritis karena mengabaikan kaidah-kaidah konservasi tanah.

4.5 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi

Sarana dan prasarana sosial ekonomi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan maupun memenuhi kebutuhan dan tingkat

sosial masyarakat. Adapun sarana yang tersedia dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi

No.	Uraian	Jumlah (bh,km)	Prosentase (%)
1.	Pasar	2	9,09
2.	Koperasi / KUD	2	9,09
3.	PUSKESMAS	1	4,55
4.	Sekolah (SD, pesantren)	4	18,18
5.	Masjid	5	22,73
6.	Jalan aspal	2	9,09
7.	Jalan desa	6	27,27
	Jumlah	22	100

Sumber : Statistik Desa, 2000

Dilihat Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan sarana khususnya pasar 2 buah dapat memudahkan petani memasarkan hasil usaha taninya. Demikian pula sarana lainnya juga tersedia misalnya adanya koperasi/KUD sebagai mitra yang sangat membantu dan menghimpun sumber dana dari masyarakat tani disekitarnya dan dimanfaatkan bersama. Hal lain yang sangat penting yaitu sumber daya manusia yang berakhlak dengan adanya sekolah, khususnya satu buah Pesantren dan Masjid yang tersedia setiap Dusun. Demikian juga sarana jalan yang memperlancar transparansi untuk hasil usaha taninya.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Petani Responden

5.1.1 Umur Petani Responden

Tabel 3. Umur Petani Responden

No.	Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	20 – 39	22	55
2.	40 – 60	18	45
	Jumlah	40	100

Sumber : Petani Responden setelah diolah, Tahun 2002

Melihat Tabel 3 menunjukkan bahwa umur antara 20 – 39 tahun terdapat 22 orang (55%) sedangkan umur antara 41 – 60 tahun 18 orang (45%). Ini menggambarkan bahwa petani responden yang mempunyai umur muda lebih banyak berarti secara fisik sebagai tenaga kerja dalam kegiatan usaha tani, sehingga pengelolaan hutan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik.

5.1.3 Luas Garapan Petani Responden

Tabel 5. Luas Tanah Garapan Petani Responden

No.	Luas Garapan (Ha)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	0,10 - 0,49	10	25
2.	0,50 - 0,99	15	37,5
3.	1,00 - 1,39	13	32,5
4.	1,40 - 1,70	2	5
	Jumlah	40	100

Sumber : Petani Responden setelah diolah, Tahun 2002

Melihat Tabel tersebut di atas bahwa semua petani responden memiliki lahan garapan yang bervariasi dan jumlah petani yang memiliki tanah garapan dengan luas antara 0,50 – 0,99 Ha sebanyak 15 orang (37,5 %); sedangkan yang terkecil adalah luas antara 1,40 – 1,70 Ha sebanyak 2 orang (5 %). Dari komposisi luas tanah garapan tersebut, mereka dapat mengembangkan pola usaha tani dengan baik, dan apabila seorang petani mempunyai luas tanah garapan lebih besar maka harus membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang besar pula.

5.2 Pelaksanaan Program Kelembagaan

Perpaduan program kelembagaan dari pemerintah melalui Departemen Kehutanan, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah setempat serta tokoh-tokoh masyarakat sangat menunjang pembangunan hutan rakyat di Desa Batumalonro dengan melihat respon masyarakat tani/kelompok tani terhadap program yang bermanfaat melalui pendekatan lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan perlu ditingkatkan. Keberhasilan pelaksanaan program kelembagaan/kelompok tani hutan rakyat di dalam mewujudkan kemandirian dipengaruhi oleh faktor, antara lain :

a. Faktor intern kelompok yaitu :

- * Anggota : Kesadaran, pengetahuan/pendidikan, keterampilan dan perasaan memiliki dll.
- * Pengurus : Keberadaan pengurus dalam kaitannya dengan dedikasi, kepemimpinan, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan menyambungkan jaringan kerja.
- * Kegiatan kelompok serta mekanisme

b. Faktor ekstern kelompok yaitu : Sosial Ekonomi

Kedua faktor ini dimiliki kelompok tani/masyarakat tani Bungung Tujua. Desa Batumalonro tergolong desa berpendidikan,

kesadaran masyarakat akan pendidikan cukup tinggi. Di lokasi pembangunan hutan rakyat terletak di dusun Bunga Sunggu dan terdapat pondok pesantren sebagai sarana pendidikan umum/agama.

Program pengembangan yang dilaksanakan dengan melalui instansi terkait dan tenaga pendamping, antara lain :

1. Program pengembangan sumber daya manusia yang meliputi penyuluhan dan pelatihan baik untuk pengurus maupun anggota. Pelatihan tentang keterampilan mengelola kelembagaan, teknis produksi, keterampilan teknis konservasi tanah dan mengelola usaha, dll.
2. Program pengembangan kelembagaan kelompok, yakni membantu menyusun peraturan dasar, peraturan rumah tangga, mekanisme dan administrasi.
3. Program pemupukan modal swadaya yakni membangun sistim tabungan atau kredit anggota melalui koperasi.
4. Program pengembangan usaha, meliputi teknik dan organisasi produksi, informasi dan teknik pemasaran.

5.2.1 Sikap Petani Responden terhadap Program Kelembagaan

Program kelembagaan yang dimaksud adalah perpaduan program yang disusun/direncanakan oleh pihak kehutanan dalam hal ini BRLKI

(Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah) dengan pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Program inilah yang menjadi dasar pelaksanaan bagi kelompok tani Bungung Tujua dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hutan rakyat. Untuk melihat sejauh mana sikap petani terhadap program kelembagaan, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sikap Petani terhadap Program Kelembagaan

No.	Uraian Sikap	Sikap			
		Setuju	%	Tidak Setuju	%
1.	Keterlibatan lembaga dalam pembangunan hutan rakyat	40	100	-	-
2.	Pembinaan program Kelembagaan	40	100	-	-
3.	Sejalan program kerja	29	72,5	11	27,5
4.	Lembaga LSM	30	75	10	25
5.	Program disusun harus sesuai dengan usulan	28	70	12	30

Sumber : Data Primer Setelah diolah, tahun 2000

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sikap petani dalam keterlibatan lembaga pada pembangunan hutan rakyat yang menyatakan setuju 40 orang (100 %), sedangkan pembina program kelembagaan sebanyak 40 orang (100 %). Sejalan program kerja petani menyatakan sikap

setuju 29 orang (72,5 %) dan menyatakan tidak setuju 11 orang (27,5 %), untuk keberadaan LSM 30 orang (75 %) menyatakan setuju dan 10 orang (25 %) tidak setuju. Sedangkan program yang disusun harus sesuai dengan usulan yang setuju 28 orang (70 %) dan yang tidak setuju 12 orang (30 %).

Berdasarkan uraian Tabel 6 berindikasi bahwa sikap petani terhadap program kelembagaan pada kegiatan hutan rakyat tersebut pada Tabel 6 menggambarkan bahwa keterlibatan lembaga dalam pembangunan hutan rakyat di Desa Batumalonro sangat dibutuhkan, demikian juga diharapkan aktualisasi pembinaan program kelembagaan yang jelas sesuai dengan program kerja yang disusun oleh kelompok tanpa mengabaikan tradisi usaha tani setempat. Dalam menetapkan pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu mengenal kultur masyarakat, sehingga keberadaannya dianggap sebagai mitra atau memfasilitasi program-program yang disusun maupun membantu menyelesaikan hambatan-hambatan dan pelaksanaan kegiatan hutan rakyat di lapangan

5.2.2 Pola Pembinaan Kelompok Tani

Pembinaan kelompok tani dalam pembangunan hutan rakyat terdiri dari :

a. Pola pembinaan non fisik antara lain

1) Pertemuan kelompok tani

Pertemuan kelompok tani dilaksanakan 2 kali sebagian bertempat di pondok kerja dengan tujuan untuk membuat dan merumuskan rencana kerja kelompok maupun mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi tentang pengembangan hutan rakyat dan diharapkan pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama.

2) Pelatihan Petani Hutan Rakyat

Pelatihan dilaksanakan dengan peserta petani hutan rakyat dengan tujuan untuk meningkatkan pengolahan dan keterampilan dalam usaha tani hutan rakyat dengan materi tentang :

- Kebijakan program kehutanan
- Pembina kelompok tani
- Kelembagaan dan pengelolaan hutan rakyat
- Pengusunan RDK dan RDKK
- Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
- Usaha tani lahan kering

Dalam pelatihan ini dilaksanakan oleh Balai Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah serta inisiatif dari Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) sekurang-kurangnya 3 kali setahun dengan jumlah peserta disesuaikan dengan kondisi biaya yang tersedia.

3) Angjansana

Angjansana dilaksanakan pembinaan/penyuluhan dari rumah ke rumah oleh petugas penyuluh kehutanan, cara ini sangat produktif mencapai sasaran karena mempunyai nilai tersendiri karena mengandung dua aspek yaitu aspek misi program pelaksanaan kegiatan modal utama dalam pendekatan secara kekeluargaan, sehingga keterbukaan petani dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam usaha tani hutan rakyat. Untuk angjansana ini dilakukan pada saat petani berada di rumah sehingga tidak mengganggu aktifitasnya sebagai seorang petani. Untuk menyelesaikan jadwal ini seorang penyuluh dapat mengunjungi 2 rumah dalam satu hari, maka untuk mengunjungi 40 orang kelompok tani membutuhkan waktu selama 20 hari setiap bulan.

c. Pola pembinaan fisik antara lain

1) Persiapan lapangan

Persiapan lapangan dilakukan lebih awal yaitu

- Penetapan lokasi hutan rakyat
- Pembuatan spanduk kerja

- Pembersihan lapangan/pengolahan tanah
- Pengadaan sasaran produksi



2) Penanaman

Penanaman dilaksanakan setelah penentuan arah larikan dan penggalian lobang tanaman dengan jarak tanam 3 x 4 m untuk kayu-kayuan dan 5 x 5 m untuk buah-buahan. Jenis tanam yang dikembangkan pada hutan rakyat di Desa Batumalonro adalah jati putih dan kemiri, sedangkan tanaman insentif adalah mangga dan rambutan. Umur tanaman yang ada di lokasi \pm 3 tahun dengan prosentase tumbuh 89 % (sesuai dengan hasil evaluasi tim Balai Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah Jeneberang – Walanae).

3) Pemupukan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit

- Pemupukan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk merangsang pertumbuhan tanaman, untuk itu kebutuhan petani hutan rakyat memerlukan jenis pupuk organik (pupuk kandang) dan pupuk an organik (NPK PLUS) untuk tanaman jangka panjang dan pupuk Urea untuk tanaman semusim.
- Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan pada saat ada gejala penyakit yang menyerang tanaman muda. Selain itu dibutuhkan obat-obatan berupa herbisida untuk memberantas

alang-alang dan tanaman pengganggu lainnya, kebiasaan ini dilaksanakan pada saat pemberantasan lapangan.

4) Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman merupakan suatu keharusan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan perlakuan :

- Penyiangan
- Pendagiran
- Penyulaman
- Pemupukan dan pemberantasan hama/penyakit
- Pengamanan

Selain itu untuk menjaga populasi tanaman sesuai dengan tegakan hutan rakyat yang mempunyai ukuran yang baik memerlukan pemeliharaan lanjutan yaitu pemeliharaan tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Selanjutnya pada umur tanaman pada tahun keempat perlu diadakan pemangkasan dan penjarangan untuk membentuk pertumbuhan batang yang lurus dan diameter kayu yang diinginkan dan pada saat-saat seperti ini sangat diperlukan pengamanan berupa pembuatan jalur hujan dan skat bakar untuk menghadapi terjadinya kebakaran pada lokasi hutan rakyat.

Kedua pola pembinaan ini dapat dilihat sikap petani hutan rakyat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sikap Petani terhadap Sistem Pembinaan Kelompok Tani

No.	Uraian Sikap	Sikap			
		Ya	%	Tidak	%
1.	Sumber daya kelompok tani	38	95	-	-
2.	Hasil yang dicapai keterlibatan kelembagaan	40	100	-	-
3.	Lembaga faktor pendukung program pembangunan desa	35	87,5	5	12,5
4.	Respon pemerintah Desa	37	92,5	-	-

Sumber : Data Primer setelah diolah, tahun 2002

Pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa sumberdaya kelompok tani mengikuti pembinaan yang menyatakan sikap ya 38 orang (95%) sedangkan 2 orang tidak menyatakan sikap, hasil yang dicapai dengan keterlibatan kelembagaan yang menyatakan ya 40 orang (100%), lembaga faktor pendukung program pembangunan desa yang menyatakan ya 35 orang (87,5%) sedangkan menyatakan tidak 5 orang (12,5%), respon pemerintah desa yang menyatakan sikap ya 37 orang (92,5%) sedangkan 5 orang tidak menyatakan sikap.

Berdasarkan Tabel 7 mengindikasikan bahwa pola pembinaan kelompok tani sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan hutan rakyat, dimana pola pembinaan kelompok tani mempunyai 2 unsur yang sangat terkait yaitu pembina teknis dan non teknis yang menyangkut tingkat sumber daya manusia (SDM) tentang pemahaman pengelolaan hutan rakyat sampai pada tahapan-tahapan kegiatan fisik di lapangan. Dari uraian sikap petani pada 4 pertanyaan petani responden dalam menentukan sikap perlu dibina secara teratur, demikian juga program yang disusun di tingkat desa harus menyentuh pada kepentingan masyarakat tani.

5.2.3 Peranan Lembaga

Dengan terciptanya peluang dan kesempatan berusaha, kelompok-kelompok dalam masyarakat hendaknya dapat diarahkan kepada suatu bentuk kelembagaan yang dalam perkembangannya mampu menciptakan bentuk kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, misalnya kelembagaan hutan rakyat, kelembagaan produksi, kelembagaan pemasaran dan tenaga kerja, dan lain-lain. Kesemuanya ini pemerintah khususnya Departemen Kehutanan menerapkan asas kemitraan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

dalam membangun kelembagaan masyarakat tani pada pembangunan hutan rakyat.

Peranan lembaga adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk menciptakan nilai tambah terhadap kelompok dan dimanfaatkan oleh kelompok tersebut. Peranan lembaga di Desa Batumalonro dalam membangun hutan rakyat dan membangun kelompok tani Bungung Tujua sangat nampak. Ini dapat dilihat pada Tabel 8. Sikap petani terhadap peranan lembaga :

- Dapat memanfaatkan sarana evaluasi artinya masyarakat dapat melihat keterlibatan kelembagaan dalam berbagai program pembangunan, khususnya pembangunan hutan rakyat.
- Mendorong tumbuhnya hubungan timbal balik dengan mitra usaha seperti BUMN, BUMS dan Koperasi.
- Menumbuhkan rasa memiliki anggota dan pemeliharaan fungsi-fungsi hutan.
- Dapat berfungsi sebagai wadah/modal diskusi dan pemecahan berbagai inovasi baru dan mencari teknologi pengembangan hutan rakyat.

Untuk mengetahui sikap petani hutan rakyat terhadap peran lembaga dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Sikap Petani terhadap Peran Lembaga

No.	Uraian Sikap	Sikap			
		Setuju	%	Tidak Setuju	%
1.	Merubah pola pikir masyarakat tani	40	100	-	-
2.	Menumbuhkan pola gotong royong	40	100	-	-
3.	Merubah pola pikir orientasi proyek ke swakelola	24	60	16	40
4.	Masyarakat tani memahami fungsi hutan	38	95	2	5
5.	Masyarakat tani mengerti sistim Pemasaran hasil hutan rakyat	24	60	16	40
6.	Meningkatkan perekonomian masyarakat tani melalui tumpang sari	39	97,5	-	-

Sumber : Data Primer setelah Diolah, tahun 2000

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa peran lembaga dalam merubah pola pikir masyarakat tani hutan rakyat sebanyak 40 orang (100 %) menyatakan setuju sedangkan untuk menumbuhkan pola gotong royong yang setuju sebanyak 40 orang (100 %). Keterlibatan lembaga dalam pengolahan hutan rakyat, masyarakat tani menyadari dan memahami betapa besar fungsi hutan sebanyak 24 orang (60 %) menyatakan setuju dan 16 orang (40 %) menyatakan tidak setuju.

Kebijaksanaan pemerintah dalam melibatkan satu lembaga untuk pengolahan hutan rakyat tentang sistim pemasaran hutan rakyat 24 orang (60 %) menyatakan setuju dan 16 orang (40 %) tidak setuju. Hasil produksi melalui tumpang sari untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebanyak 39 orang (97,5 %) menyatakan setuju dan 1 orang tidak menyatakan sikap.

Berdasarkan pada Tabel 8 memendikasikan bahwa peranan lembaga dalam merubah pola pikir sangat diperlukan dalam satu wadah organisasi yang terbentuk pada kegiatan hutan rakyat di Desa Batumalonro Kabupaten Gowa. Untuk itu bentuk kelembagaan yang berperan sesuai dengan sikap petani hutan rakyat yang nampak pada uraian dalam tabel tersebut di atas tersirat bahwa perbandingan yang menyatakan sikap setuju dan tidak setuju dari responden dari 6 pertanyaan masih perlu memperhatikan beberapa hal untuk dapat ditingkatkan peran kelembagaan hutan rakyat di Desa Batumalonro antara lain masyarakat masih berorientasi pada kegiatan proyek sehingga apabila tidak ada bantuan dana pemerintah mereka tidak bekerja dengan baik dalam pengelolaan hutan rakyat. Paradigma ini perlu dirubah melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan agar masyarakat tani dapat bersatu dengan swadaya dan akhirnya mereka merasa memiliki

5.2.4 Motivasi Masyarakat Menerima Program Kelembagaan

Dalam proses pengelolaan hutan rakyat diperlukan suatu motivasi yang nyata untuk membentuk kemandirian dan kemajuan secara operasional dengan pelaksanaan pengelolaan usaha tani hutan rakyat. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pengembangan hutan rakyat maka perlu membutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk membantu dalam bentuk :

- Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai fasilitator.
- Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani hutan rakyat.
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan hutan rakyat (bibit, pupuk, obat-obatan dan biaya pengolahan).

Hal tersebut di atas akan memberikan pengaruh terhadap sikap petani dengan giat untuk meningkatkan peran lebih aktif dalam pengembangan hutan rakyat. Untuk melihat sejauh mana pengaruh motivasi masyarakat menerima program kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Motivasi Masyarakat Menerima Program Kelembagaan

No.	Uraian Motivasi	Sikap			
		Benar	%	Salah	%
1.	Mewujudkan masyarakat untuk mufakat	38	95	2	5
2.	Keberanian penyaluran pendapat	38	95	2	5
3.	Memahami program jangka panjang	37	92,5	3	7,5
4.	Keterlibatan pemerintah, instansi dan lembaga faktor pertumbuhan suatu kelompok	38	95	2	5

Sumber : Data Primer setelah Diolah, tahun 2000

Pada Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa dengan adanya kelembagaan dapat mewujudkan musyawarah dan mufakat, yang menyatakan sikap benar sebanyak 38 orang (95 %) sedangkan 2 orang tidak menyatakan sikap, keberanian petani-petani menyalurkan pendapat sebanyak 38 orang (95 %) menyatakan sikap benar, sedangkan 2 orang tidak menyatakan sikap, program jangka panjang dengan menyatakan sikap benar 37 orang (92,5 %). Sedangkan, 3 orang tidak menyatakan sikap unsur keterlibatan pemerintah dalam lembaga untuk pertumbuhan satu kelompok yang menyatakan sikap benar 38 orang (95 %), sedangkan 2 orang tidak menyatakan sikap.

Berdasarkan pada tabel 9 berindikasi bahwa pengaruh terhadap motivasi sangat penting untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Gowa khususnya di Desa Batumalonro. Hal ini terlihat adanya sikap peserta hutan rakyat memberikan penilaian pendapat yang benar dari 40 orang responden rata-rata di atas 90 %, untuk 4 pertanyaan. Dari usaha dan bentuk sikap yang ada perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk memperlakukan kondisi dan proses keinginan petani sebagai manifestasi untuk mencapai tujuan demi kepentingan bersama dalam pengembangan hutan rakyat yang akan datang. Sedangkan dari uraian sikap tersebut ada petani responden masih ragu menyatakan sikap benar atau salah, untuk itu perlu ditingkatkan pembinaan dan penyuluhan serta diberikan insentif secara nyata agar mereka mau menerima program-program yang disampaikan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kelembagaan sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan rakyat, kegiatan hutan rakyat yang dilaksanakan sebelum ada campur tangan oleh lembaga, kondisi masyarakat belum menggambarkan bentuk pengelolaan hutan yang benar, sehingga masyarakat lebih cenderung melakukan dengan kebiasaan tradisional tanpa ada suatu perencanaan, pelaksanaan pembuatan hutan rakyat secara baik dan benar.
- b. Untuk memberi motivasi kepada petani yang berkaitan erat dengan kondisi masyarakat, berupa lemahnya penguasaan teknologi, lemah modal dan lemah dalam mempertahankan asset pasar, maka mereka sangat membutuhkan perhatian partisipasi dari pihak lain.

6.2 Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan :

- a. Dalam proses pengelolaan hutan rakyat secara operasional pelaksanaannya dilakukan oleh petani. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan, maka dalam pelaksanaannya petani perlu memiliki dan membentuk lembaga dalam menentukan proses mekanisme pengelolaan hutan rakyat antara lain memberikan jasa perencanaan, teknis budidaya yang baik.
- b. Untuk menggerakkan usaha-usaha yang telah ada dalam rangka menunjang pengelolaan hutan rakyat perlu diadakan pelatihan penyuluhan serta pembina kelompok, demikian juga penambahan modal kelompok melalui koperasi, jasa perbankan. Dan untuk ekspansi pasar perlu adanya mitra atau bapak angkat dari pihak industri per kayu yang dapat menampung hasil hutan rakyat dengan dasar kerjasama yang saling menguntungkan.

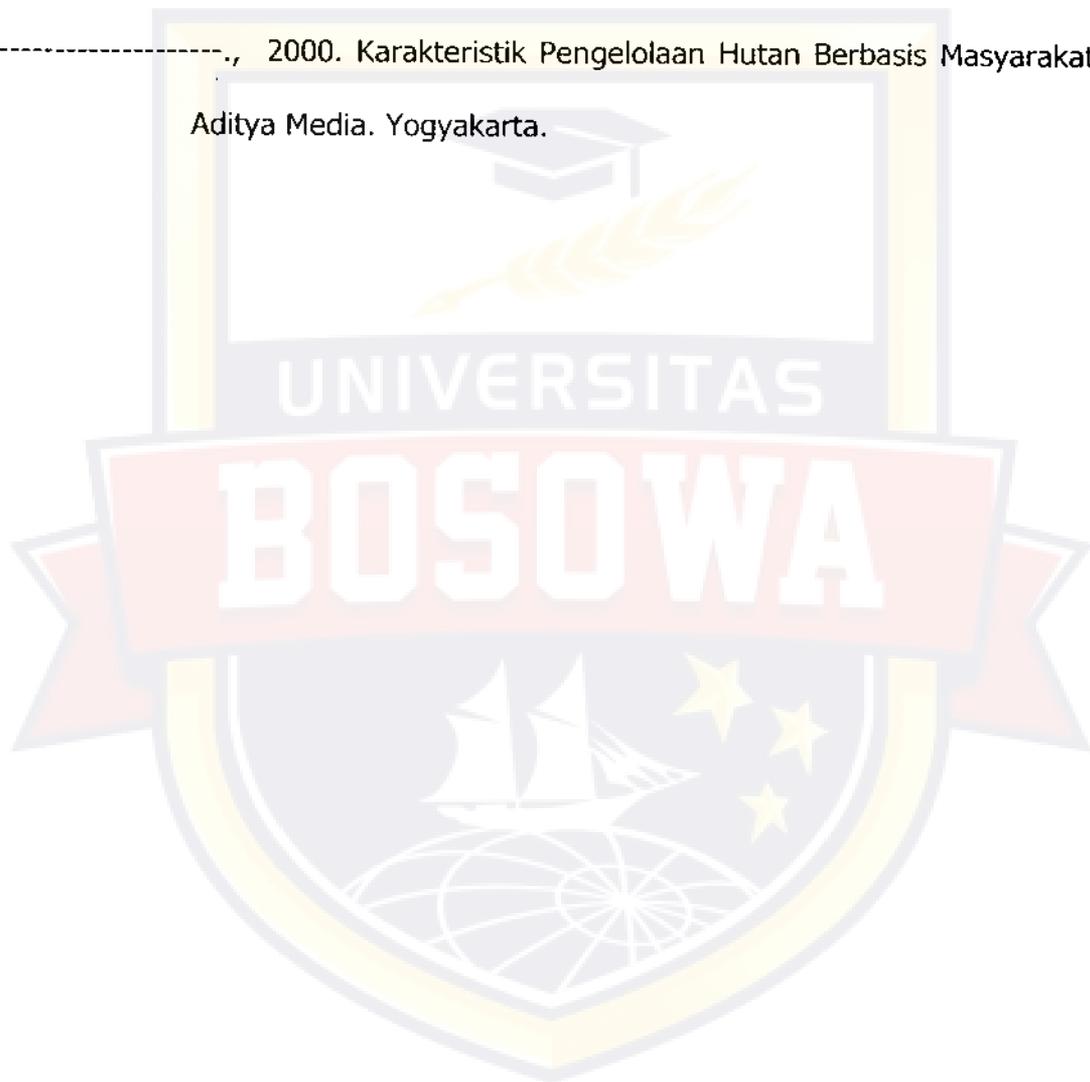
DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., 1999. Strategi Pengembangan Kehutanan Masyarakat. Fakultas Pertanian dan Kehutanan UNHAS. Makassar
- Departemen Kehutanan, 1998. Pedoman Pembinaan Kelompok Tani.
- Departemen Kehutanan, 1990. Usaha Tani Hutan Rakyat di Sulawesi Selatan.
- Departemen Kehutanan, 1996. Pedoman Pembinaan Kelembagaan Usaha Tani Hutan Rakyat. Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 1998. Pembinaan Kelompok Tani. Jakarta.
- Djatiwijaya. HR. 1982. Kerja Sama Sosial Kemasyarakatan. Jakarta.
- Harnanto H.M.,. 1997. Peran Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengembangan Hutan Rakyat. Jakarta.
- LPPM-UNHAS. 1996. Rencana Umum Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Rakyat di Sulawesi Selatan.
- Moenir, A.S., 1987. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kelembagaan . Gunung Agung Jakarta.
- Moekijat, Drs. 1988. Asas-asas Prilaku Organisasi. Mandar Maju. Bandung.
- Ndraha, T., 1984. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Bina Aksara Jakarta.

Sambolinggi, L., 2000. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Hutan Rakyat/
Hutan Kemasyarakatan. Makassar.

Suharjita, Didik., 2000. Hutan Rakyat di Jawa. Program Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan Masyarakat. Bogor.

-----., 2000. Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.
Aditya Media. Yogyakarta.





Lampiran 1. Nama-nama Petani Responden Pada Kelompok Tani Hutan Rakyat

Desa : Batumalonro

Kecamatan : Biringbulu

Kabupaten : Gowa

Luas : 25 Ha

No.	N a m a	Alamat	Kedudukan dalam Kelompok
1	2	3	4
1.	H. Dg. Tutu	Batumalonro	Batumalonro
2.	Haerul	-sda-	-sda-
3.	J. Dg. Rate	-sda-	-sda-
4.	Dg. Rowa	-sda-	-sda-
5.	Dg. Sila	-sda-	-sda-
6.	Dg. Tulung	-sda-	-sda-
7.	Said	-sda-	-sda-
8.	Dg. Bali	-sda-	-sda-
9.	Dg. Ngaman	-sda-	-sda-
10.	Lawa	-sda-	-sda-
11.	S. Dg. Rate	-sda-	-sda-
12.	Rahimi	-sda-	-sda-
13.	Naba	-sda-	-sda-
14.	Nuntung	-sda-	-sda-
15.	Dg. Tona	-sda-	-sda-
16.	Dg. Kulle	-sda-	-sda-
17.	Duka'	-sda-	-sda-
18.	Satuddin	-sda-	-sda-
19.	Samsuddin	-sda-	-sda-
20.	Syamsu Alam	-sda-	-sda-

No.	N a m a	Alamat	Kedudukan dalam Kelompok
1	2	3	4
22.	Kamiseng	Batumalonro	Anggota
23.	Dg. Ngeppe	-sda-	-sda-
24.	Ronrong	-sda-	-sda-
25.	Simbung	-sda-	-sda-
26.	Abd. Rajab	-sda-	-sda-
27.	Dg. Nyarrang	-sda-	-sda-
28.	Abd. Haris	-sda-	-sda-
29.	Baso Tinri	-sda-	-sda-
30.	Dg. Kulle	-sda-	-sda-
31.	Dg. Ngewa	-sda-	-sda-
32.	Zainuddin	-sda-	-sda-
33.	Jamaluddin	-sda-	-sda-
34.	Basri	-sda-	-sda-
35.	Dg. Liwang	-sda-	-sda-
36.	Dg. Ralang	-sda-	-sda-
37.	Sirajuddin	-sda-	-sda-
38.	Dahlan	-sda-	-sda-
39.	Mahir	-sda-	-sda-
40.	Jumaran	-sda-	-sda-